

II. KERANGKA PENDEKATAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Lahan Kering

Pada umumnya lahan kering memiliki tingkat kesuburan tanah yang rendah, keterbatasan air pada lahan kering mengakibatkan usahatani tidak dapat dilakukan sepanjang tahun, penyebabnya antara lain adalah distribusi dan pola hujan yang fluktuatif. Wilayah barat Indonesia lebih basah dibandingkan dengan wilayah timur, dan secara temporal terdapat perbedaan distribusi hujan pada musim hujan dan kemarau (Abdurachman, dkk, 2008).

Sifat kimia lahan kering yaitu adanya tingkat kemasaman tanah yang tinggi (pH 3,5 – 5,5), senyawa Al, Fe dan Mn yang tinggi sehingga mendekati batas meracuni tanaman. Selain itu ciri lahan kering lainnya terletak pada kemiringan lereng yang cukup curam (> 15%), iklim kering, sebagian besar berlereng curam dan terjal sehingga mengalami erosi yang cukup tinggi. Sebagian besar lahan padi di lahan kering merupakan jenis podsolik merah kuning dan latosol, jenis lain tidak banyak ditanami padi (Noor, 1996).

Lahan kering merupakan lahan yang mempunyai potensi besar untuk usaha pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura maupun tanaman tahunan. Lahan kering yang potensial dapat menghasilkan berbagai komoditas pertanian jika dikelola dengan menggunakan teknologi dan strategi pengembangan yang tepat (abdurachman dkk, 2008). Menurut Noor (1996) kendala dalam budidaya padi di lahan kering yaitu dihadapkan pada pertumbuhan gulma yang cukup mengganggu.

Lahan kering ini banyak tersebar di luar wilayah Jawa, seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Irian Jaya (Noor, 1996), namun lahan kering juga terdapat di Pulau Jawa salah satunya di Daerah Wonosari, Gunungkidul, Yogyakarta yang mayoritas jenis lahannya yaitu lahan kering. Lahan semacam ini menurut Abdurachman dkk (2008) lebih sesuai untuk tanaman tahunan, namun banyak pula dimanfaatkan untuk tanaman pangan.

Berdasarkan rencana pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan dengan mengupayakan berbagai aspek yang salah satunya dengan memperluas pertanian lahan kering sebanyak 250.000 ha pada tahun 2016 (KEMENTAN, 2015). Salah satu Program pemerintah kementerian pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan dalam rangka optimalisasi lahan pekarangan yaitu dengan program KRPL (kawasan rumah pangan lestari) yang saat ini telah diterapkan diberbagai daerah di Indonesia termasuk pertanian dengan lahan kering (litbang pertanian, 2012).

Berdasarkan penelitian Sitepu (2007) pola usahatani lahan kering yang diusahakan di Desa Selopamiro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul adalah Tumpangsari dan *mixed farming* dengan ternak. Tanaman yang dibudidayakan dengan pola tumpangsari tersebut adalah kacang/jagung - kacang/singkong/hortikultura bagi petani yang memiliki dan parit, sedangkan petani yang tidak memiliki dan parit pola tanamnya kacang/jagung/singkong - kacang/jagung/singkong.

2. Curahan Waktu Kerja

Faktor yang mendorong anggota rumah tangga untuk mengalokasikan waktunya dalam bekerja di antaranya yaitu umur, jumlah tanggungan kepala keluarga, tingkat pendidikan, pendapatan per kapita keluarga, dan upah (Eliana & Ratina, 2007). Namun faktor curahan waktu kerja pada usahatani menurut suratiah (2015) dipengaruhi oleh : i) faktor alam yang meliputi curahan hujan, iklim, kesuburan, jenis tanah dan topografi, ii) faktor jenis lahan yang meliputi sawah, tegal, dan pekarangan, iii) luas, letak dan penyebarannya. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan terjadinya perbedaan kesibukan tenaga kerja, contohnya usahatani di lahan kering yang hanya mengandalkan air hujan dan akan sibuk ketika musim hujan sedangkan ketika musim kemarau akan banyak waktu luang karena lahan yang tidak dapat ditanami (lahannya bero) (suratiah, 2015). Pada umumnya anggota rumah tangga di pedesaan memiliki berbagai jenis pekerjaan, menurut Suratiah (2015) biasanya pada saat sibuk petani mengutamakan tenaga kerja keluarga sedangkan disaat yang lain petani harus dapat mencari peluang di luar (*off farm activities*) agar pendapatan tetap terjaga. Menjadi petani akan bebas menentukan kegiatannya termasuk kegiatan usahatannya. Penciptaan hari kerja dilihat dari curahan waktu kerja untuk pencapaian penghidupan yaitu 200 hari kerja/tahun, setara dengan 1600 jam kerja/tahun (1 HKO = 8 jam) (Sconess, 1998).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Hendrayani (2010) menyatakan bahwa besarnya curahan waktu kerja wanita pada industri karak skala rumah tangga di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo adalah 233,57 jam/bulan dari total

curahan waktu kerja sebesar 712,59 jam/bulan. Sedangkan, menurut penelitian Hendayan & Togatorop (2006) mengenai pengalokasian waktu kerja keluarga dalam usaha ternak dan dampaknya terhadap pendapatan rumah tangga menyatakan bahwa alokasi waktu kerja pemeliharaan tergantung pada kegiatan pemeliharaan ternak yang terdiri dari: mencari rumput/pakan, menggembala, membersihkan kandang, memberi pakan/minum, pengobatan, memandikan, mengawinkan, dan menjual ternak. Alokasi waktu kerja keluarga untuk setiap jenis pekerjaan tersebut berkisar antara 0,5 – 4 jam bagi pria; 0,1 – 3,3 jam bagi wanita, dan bagi anak-anak antara 0,1 – 4 jam per hari. Alokasi waktu kerja tertinggi adalah menggembalakan ternak dan terendah pemberian pakan.

3. Struktur Pendapatan

Pendapatan Rumah Tangga adalah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga bersangkutan baik yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga (www.mediabpr.com). Menurut Hardono & Saliem (2000) sumber pendapatan adalah setiap aktifitas usaha maupun bukan usaha yang memberikan penerimaan keuangan bagi rumah tangga. pendapatan rumah tangga di desa cenderung lebih beragam, namun merupakan rumah tangga yang berpendapatan rendah dan rumah tangga yang pekerjaan kepala keluarganya di sektor pertanian, dimana usaha di sektor pertanian tidak lagi dapat diandalkan untuk memberikan jaminan kecukupan pendapatan rumah (Hardono & Saliem, 2000), menurutnya rendahnya pendapatan rumah tangga petani tersebut diduga tidak terlepas dari pengaruh situasi struktur

perekonomian secara makro. Menurut Samuel PS Ho dalam Ken Suratiyah (1994) sumber pendapatan berasal dari 3 sumber, yaitu *on farm*, *off farm* dan *non farm*.

a. *On farm*

Pendapatan *on farm* yaitu pendapatan yang berasal dari hasil usahatani milik sendiri. Hasil usahatani milik sendiri atau hasil panen yang diperoleh dari proses budidaya pertanian.

b. *Off farm*

Pendapatan *off farm* merupakan pendapatan yang berasal dari hasil berburuh tani di luar dari usahatani milik sendiri atau bekerja di usahatani milik orang lain. Bagi sebagian rumah tangga petani yang berpendapatan rendah, seluruh atau sebagian anggota keluarganya akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari pekerjaan di luar usahatani sendiri, termasuk kegiatan *off farm*, menjadi buruh tani pada usahatani orang lain.

Budaya gotong royong yang masih terjaga dengan baik dapat mendorong anggota keluarga petani ikut serta membantu dalam usahatani orang lain. Biasanya dengan kekerabatan yang erat tersebut tidak ada upah kerja bagi buruh tani, tetapi ada pula buruh tani yang diberi upah sesuai dengan pekerjaannya. Pekerjaan menjadi buruh tani meliputi, pengolahan lahan, penanaman, pengendalian HPT (Hama Penyakit Tanaman) seperti penyemprotan pestisida, pemupukan hingga panen.

c. *Non farm*

Pendapatan dari luar usahatani (*non farm*) yaitu pendapatan yang bersumber selain dari usaha pertanian seperti hasil perdagangan, menjual jasa, kegiatan

industri dan kegiatan berburuh (pertukangan, buruh industri dan buruh di luar pertanian lainnya).

Dalam mengelola usahatani petani akan mengeluarkan biaya guna mendukung usahatani tersebut. Biaya usahatani merupakan biaya yang habis digunakan dalam proses produksi. Menurut Joesron dan Fathorrozi (2003) biaya dikelompokkan berdasarkan realitas dan sifatnya. Berdasarkan realitas biaya di bagi menjadi dua, yaitu :

- a. Biaya eksplisit ialah pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli atau menyewa input atau faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk. Contohnya pembelian sarana produksi, upah tenaga kerja, biaya sewa tanah, dan lain-lain.
- b. Biaya Implisit ialah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang berasal dari milik sendiri atau keluarga sehingga tidak diperhitungkan. Contohnya nilai sewa lahan sendiri, nilai tenaga kerja keluarga, biaya modal sendiri dan semua nilai sarana produksi milik petani yang tidak dibeli.

Sedangkan menurut sifatnya biaya dikelompokkan menjadi 2 yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Menurut Soekartawi (2002) mengemukakan bahwa biaya tetap (*Fix Cos*) merupakan biaya yang jumlahnya relatif tetap dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit. Jadi, besarnya biaya tetap tidak bergantung pada besar kecilnya produksi yang diperoleh. Contohnya seperti pajak, sewa lahan dan alat pertanian. Biaya Tidak Tetap (*Variable Cost*) merupakan biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh produksi yang diperoleh, sehingga biaya ini sifatnya bergantung pada besar kecilnya yang produksi yang

diinginkan. Contohnya seperti biaya tenaga kerja dan biaya input (benih, pupuk, pestisida).

Menurut Joesron dan Fathorrozi (2003) untuk mengetahui total biaya (*total cost/TC*) yang dikeluarkan dalam usahatani yaitu dengan menjumlahkan biaya implisit (*total implicit cost/TIC*) dan biaya eksplisit (*total explicit cost/TEC*) atau dengan rumus :

$$TC = TIC + TEC$$

Selain total biaya yang perlu diketahui, untuk mencari besaran pendapatan usahatani, perlu pula mengetahui besaran penerimaan (*Total Revenue/TR*) usahatani yang dapat diperoleh dari perkalian produksi dengan harga jualnya. Setelah keduanya diketahui maka pendapatan usahatani dapat dihitung dengan rumusan :

$$Pd = TR - TEC$$

Keterangan :

Pd = Pendapatan Usahatani

TR = Total Penerimaan (*Total Revenue*)

TEC = Total Biaya Eksplisit (*Total Explicit Cost*)

Masing-masing sumber pendapatan yang terdiri dari *on farm* meliputi usahatani pekarangan dan usahatani lahan tegalan serta sumber pendapatan dari kegiatan *off farm* dan *non farm*. Suratiyah & Hariadi (1990) menentukan besarnya kontribusi pendapatan *on farm* terhadap pendapatan total dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika kontribusi pendapatan < 25%, kontribusinya kecil
- b. Jika kontribusi pendapatan 25 - 49%, kontribusinya sedang
- c. Jika kontribusi pendapatan 49 - 75%, kontribusinya besar

d. Jika kontribusi pendapatan > 75%, kontribusinya besar sekali

Berdasarkan penelitian Aryandini (2012) pendapatan terbesar rumah tangga di Desa Tambakselo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan berasal dari luar usahatani yaitu sebesar Rp. 12,4 juta dan pendapatan usahatani menduduki peringkat kedua. Pendapatan usahatani tidak terlalu besar karena pada musim tanam padi terjadi serangan hama wereng sehingga menyebabkan banyaknya padi yang tidak dapat dipanen.

4. Tingkat Kesejahteraan

Rumah tangga dikatakan sejahtera jika sudah tidak memprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan mengalokasikan pengeluaran untuk kebutuhan di luar kebutuhan dasar yaitu kebutuhan sekunder, selain itu rumah tangga dengan anggota keluarga sedikit akan memiliki peluang untuk lebih sejahtera dibanding rumah tangga dengan jumlah anggota keluarga yang lebih besar (Muflikhati *et al*, 2010).

Kesejahteraan berkaitan dengan pendapatan, menurut Hardono dan Saliem (2000) Perubahan pendapatan masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi telah meningkatkan tingkat kesejahteraan yang merupakan indikator keberhasilan proses pembangunan. Namun, menurut Muflikhati *et al* (2010) mengatakan bahwa meski peningkatan pendapatan penting tetapi tidak cukup untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa diikuti perubahan *mind set* terutama dalam hal investasi pendidikan dan kesehatan. Pendidikan menjadi penting dalam peningkatan kesejahteraan sebab pendidikan terkait terhadap beberapa aspek

seperti kesehatan, gizi, perumahan dan lain lain (Zuluaga dalam Muflikhati, 2010).

Sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor pertanian, sehingga kesejahteraan petani masih sulit untuk dicapai. Salah satu penyebab hal tersebut adalah sulitnya pembiayaan usahatani dan kebutuhan dana guna pemenuhan kebutuhan selama menunggu masa panen. Petani akan sejahtera jika dapat menerapkan kaidah bisnis pada usahatannya seperti pengambilan keputusan, pengelolaan sumberdaya, tuntutan untuk menciptakan nilai tambah, keunikan produk, kepioniran (Sunarti & Khomsan, 2006).

Arifin dkk (2010) mengukur tingkat kesejahteraan dengan menggunakan GSR (*Good Service Ratio*) yaitu dengan rumus :

$$\text{GSR} = \frac{\text{Pengeluaran untuk kebutuhan pangan}}{\text{Pengeluaran untuk kebutuhan non pangan}}$$

Keterangan :

GSR > 1 artinya ekonomi rumah tangga kurang sejahtera

GSR = 1 artinya ekonomi rumah tangga sejahtera

GSR < 1 artinya ekonomi rumah tangga lebih sejahtera

Berdasarkan penjelasan rinci menurut aryandini (2012) yang mengukur kesejahteraan menggunakan GSR yaitu dengan membandingkan pengeluaran konsumsi bahan pangan (kebutuhan primer) dengan pengeluaran konsumsi jasa dan pelayanan (kebutuhan sekunder). Semakin kecil nilai GSR maka berarti pendapatan rumah tangga semakin tinggi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekunder seperti jasa dan pelayanan. Pengeluaran konsumsi pangan meliputi berbagai bahan pangan yang dikonsumsi oleh suatu rumah tangga seperti

beras, lauk pauk, sayuran dan bahan pangan lainnya, sedangkan pengeluaran kebutuhan sekunder meliputi biaya yang dikeluarkan untuk selain pembelian bahan pangan seperti biaya pajak kendaraan, biaya kesehatan, biaya untuk kegiatan sosial dan yang lainnya.

Yusria (2010) mengemukakan bahwa menurut hasil perhitungan GSR yaitu pada rumah tangga petani jambu mete Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara diperoleh hasil GS Ratio sebesar 0,99. Berdasarkan kategori yang sudah dibuat, maka angka tersebut tergolong dalam kriteria lebih sejahtera.

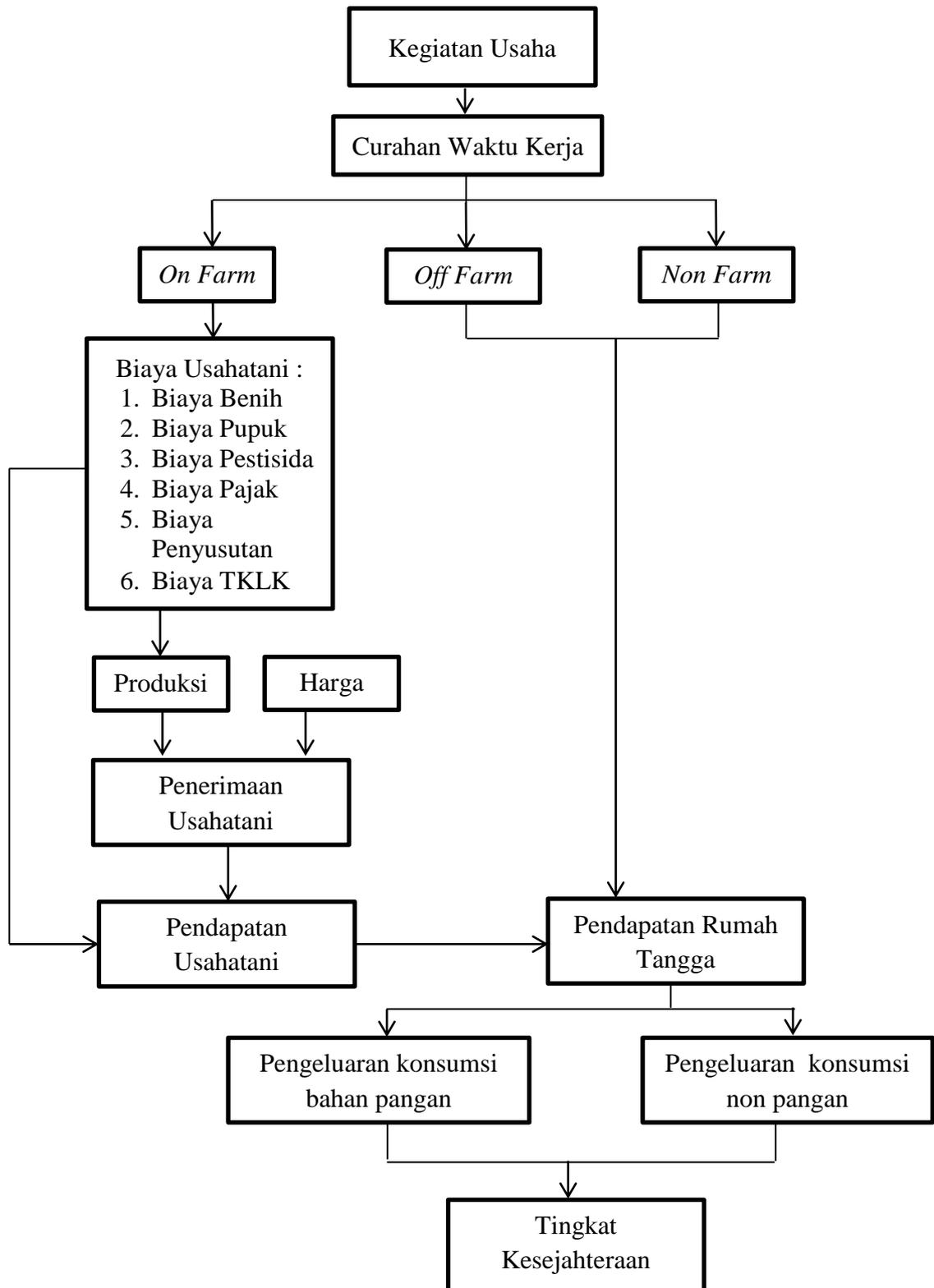
Aryandini (2012) menyatakan bahwa 56,67% rumah tangga petani di Desa Tambakselo berada pada kategori tidak sejahtera ($GSR > 1$). Namun, presentase rumah tangga yang tergolong sejahtera ($GSR = 1$) juga cukup besar yaitu 30%, dan rumah tangga lebih sejahtera dengan nilai $GSR < 1$ sebesar 13,33%. Sedangkan menurut hasil penelitian Sari, *et al* (2014) tingkat kesejahteraan dengan indikator BPS menunjukkan bahwa 70,59 % petani responden yang masuk kategori sejahtera, selebihnya berada pada kategori tidak sejahtera. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah letak lokasi Desa Muara Putih, Merak Batin, dan Krawang Sari yang tidak jauh dari pusat pemasaran di Kecamatan Natar dan Kota Bandar Lampung, sehingga lebih dekat dengan pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki sarana dan prasarana mendukung.

B. Kerangka Pemikiran

Desa Piyaman merupakan desa yang terletak di wilayah lahan kering dengan jumlah petani sebanyak 1.596 orang (Data monografi Desa Piyaman, 2015). Profesi sebagai petani akan bebas menentukan kegiatannya termasuk dalam

usahatannya, berbagai kegiatan tersebutlah yang akan menentukan besaran curahhan waktu yang diberikan dalam bekerja baik dalam usahatani maupun di luar sektor pertanian. Curahan waktu kerja yang diberikan merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Sebagian penduduk Desa Piyaman tidak hanya bergantung pada hasil usahatannya namun banyak pula yang bekerja di luar usahatani seperti pedagang, buruh tani dan buruh bangunan. Berbagai sumber pendapatan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sebagai bentuk pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga terbagi menjadi pengeluaran konsumsi bahan pangan dan pengeluaran konsumsi non pangan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga. Berikut ini bagan kerangka pemikiran dalam penelitian ini.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran